

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Objek wisata Air Terjun Pletuk yang terletak di Desa Sooko, Kabupaten Ponorogo, merupakan salah satu destinasi wisata alam unggulan yang menawarkan pesona keindahan air terjun yang asri dan alami. Sebelum terjadinya pencemaran, kawasan ini menjadi tujuan utama wisatawan lokal maupun luar daerah untuk menikmati kesejukan alam dan keindahan panorama hutan tropis. Tingginya jumlah kunjungan wisatawan turut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, di mana masyarakat sekitar menggantungkan hidup dari aktivitas perdagangan, jasa parkir, hingga homestay.

Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi lingkungan di kawasan Air Terjun Pletuk mengalami penurunan kualitas akibat pencemaran lingkungan yang bersumber dari limbah peternakan sapi milik warga. Limbah yang dibuang langsung ke aliran sungai menyebabkan air menjadi keruh, berbau, dan tidak layak digunakan. Dampak pencemaran air pada kesehatan dari kontaminasi air sangat banyak dan beragam. Paparan air yang terkontaminasi dapat menyebabkan efek kesehatan akut atau kronis, tergantung pada kontaminan spesifik dan durasi serta tingkat paparan. Penyakit yang ditularkan melalui air dapat menyebabkan gangguan pencernaan, dehidrasi, dan bahkan kondisi yang mengancam jiwa, terutama pada populasi yang rentan seperti anak-anak, orang tua, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Paparan jangka panjang terhadap kontaminan tertentu dapat menyebabkan kerusakan organ, masalah perkembangan, masalah reproduksi, dan peningkatan risiko kanker (Erpinda et al., 2024).

Berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo bekerja sama dengan Envilab Surabaya, diketahui bahwa kadar pencemaran mencapai delapan kali lipat dari ambang batas minimum

oksigen terlarut. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa kondisi air sungai yang mengalir ke Air Terjun Pletuk berada dalam status sangat tercemar, dan berpotensi mengancam kesehatan masyarakat serta keselamatan pengunjung wisata. tata kelola wisata berkelanjutan, semestinya terdapat sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, dan dinas terkait untuk menetapkan regulasi dan pengawasan terhadap aktivitas yang berdampak langsung terhadap kelestarian lingkungan. Seperti yang dijelaskan oleh Milandika et al. (2024), tata kelola publik yang baik menuntut transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Dalam hal ini, aktivitas peternakan yang berdampak terhadap pencemaran seharusnya dapat dikelola melalui perencanaan tata ruang yang bijak, serta penyediaan infrastruktur pengelolaan limbah oleh pemerintah desa ataupun kelompok masyarakat. Sebagaimana yang terjadi di Tanah Goyang, Pudak Wetan, persoalan lingkungan sering kali muncul akibat lemahnya kapasitas kelembagaan desa dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelestarian lingkungan sebagai modal utama pembangunan pariwisata. Pemerintah desa cenderung hanya berfungsi sebagai pemberi regulasi dan modal, namun tidak berperan aktif dalam proses pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan.

Kondisi pencemaran yang terjadi di kawasan Air Terjun Pletuk tidak hanya menimbulkan degradasi lingkungan, tetapi juga memicu konflik sosial antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda terhadap kawasan wisata tersebut. Di satu sisi, masyarakat pemilik ternak menggantungkan sumber penghidupan mereka dari aktivitas peternakan, Eskalasi pencemaran yang melanda kawasan Air Terjun Pletuk ternyata tidak hanya menimbulkan kerusakan ekosistem, tetapi juga memicu konflik sosial yang cukup tajam. Salah satu konflik yang mencolok muncul antara kelompok peternak sapi di Kecamatan Pudak, yang membuang limbah ternak ke aliran Sungai Keyang, dengan masyarakat Desa Jurug dan Sooko serta pengelola wisata, yang mengalami kerugian akibat tercemar.

Penutupan tersebut menimbulkan konfrontasi sosial karena dianggap sepihak dan berdampak langsung pada mata pencaharian masyarakat yang menggantungkan ekonomi dari sektor wisata. Sebagian warga menilai bahwa tidak ada komunikasi dan koordinasi yang memadai sebelum kebijakan diambil, sehingga muncul rasa ketidakadilan di kalangan pelaku usaha dan warga lokal. Konflik semakin melebar ketika aktivis mahasiswa dari PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Cabang Ponorogo turun ke lapangan dan menuntut pertanggungjawaban dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, dan Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo. Mereka melakukan audiensi dan menyuarakan aspirasi warga terkait pencemaran yang semakin parah dan dianggap diabaikan oleh instansi terkait. Bahkan, beberapa pihak menyebutkan bahwa konflik yang terjadi adalah bentuk dari ketegangan struktural akibat tumpang tindih kewenangan, lemahnya sistem pengawasan, dan minimnya solusi konkret dari pemerintah.

Dalam forum mediasi lintas dinas yang diselenggarakan di Kantor Kecamatan Pudak, suasana pertemuan berlangsung dalam atmosfer penuh ketegangan, karena masing-masing pihak saling menyalahkan dan mempertahankan argumen tanpa adanya solusi yang benar-benar disepakati bersama. Situasi ini menunjukkan bahwa pencemaran Air Terjun Pletuk telah berkembang menjadi konflik sosial multidimensi yang mencerminkan pertentangan antara kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan fungsi birokrasi pemerintahan desa maupun kabupaten.

Fenomena pencemaran Air Terjun Pletuk menjadi refleksi penting bagi urgensi penguatan kelembagaan desa dalam tata kelola lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pembangunan kepariwisataan harus dilakukan secara sistematis dan terencana, dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan desa harus memiliki strategi pembangunan wisata yang berbasis konservasi dan partisipasi masyarakat. Dalam upaya pencegahan dan penanganan pencemaran, peran serta masyarakat sangat penting. Masyarakat yang

sebelumnya bergantung pada sektor pariwisata harus dilibatkan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan lingkungan agar tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Strategi edukatif seperti pelatihan pengelolaan limbah, sosialisasi pentingnya kebersihan lingkungan, serta penguatan kelembagaan seperti Pokdarwis dan BUMDes dapat menjadi solusi untuk mengintegrasikan kepentingan ekonomi dan pelestarian alam.

Penelitian ini menjadi sangat penting untuk mengkaji dinamika pencemaran lingkungan di Air Terjun Pletuk secara komprehensif. Fokus utama diarahkan pada pemetaan faktor-faktor penyebab pencemaran, dampak terhadap sektor pariwisata dan sosial ekonomi masyarakat, serta evaluasi terhadap peran pemerintah desa dan lembaga terkait dalam menangani persoalan tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan rekomendasi kebijakan pengelolaan wisata alam yang lebih berkelanjutan, berbasis partisipasi, dan adaptif terhadap tantangan lingkungan.

Seperti dijelaskan oleh Sunarti et al. (2022), partisipasi publik dalam pengelolaan pariwisata belum sepenuhnya bertransformasi menjadi peran pengawasan yang aktif karena lemahnya komunikasi antar pemangku kepentingan dan tidak adanya indikator evaluasi yang dipahami bersama. Oleh karena itu, tata kelola wisata berbasis kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan swasta harus diperkuat melalui regulasi, pendampingan teknis, serta pelibatan semua pihak dalam proses evaluasi dan perencanaan pengembangan wisata. Dengan melihat permasalahan pencemaran yang terjadi di Air Terjun Pletuk, sudah saatnya dilakukan perubahan pendekatan pengelolaan wisata dari sekadar eksploitasi alam menjadi konservasi berbasis masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat wacana pembangunan pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal dalam jangka panjang.

Di sisi lain, Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sebenarnya telah mengatur dengan cukup rinci mengenai kewajiban individu maupun kelompok dalam mengelola limbah domestik, termasuk dari aktivitas peternakan. Namun demikian, implementasi dari peraturan ini belum optimal di tingkat desa. Minimnya pengawasan serta kurangnya sosialisasi menyebabkan banyak warga belum memahami atau bahkan mengabaikan aturan tersebut. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dan desa dalam menegakkan prinsip perlindungan lingkungan. Desa Sooko sendiri memiliki kelompok kerja (Pokja) IV yang bertugas dalam bidang kesehatan dan kelestarian lingkungan. Pokja ini berpotensi besar untuk memainkan peran sentral dalam penanggulangan pencemaran, namun dalam praktiknya, peran tersebut belum terlihat aktif atau maksimal. Padahal, melalui kegiatan edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pencemaran akibat limbah ternak bisa ditekan.

Lebih jauh, berdasarkan wawancara dengan warga setempat yang dilakukan oleh tim jurnalis lokal, masyarakat mengeluhkan dampak langsung pencemaran terhadap kehidupan sehari-hari. Air yang dulunya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga kini tidak lagi layak konsumsi. Anak-anak dilarang bermain di sungai karena dikhawatirkan terpapar penyakit kulit. Hal ini menimbulkan tekanan sosial dan kesehatan, terutama bagi warga yang bermukim di hilir sungai. Kejadian ini bukan hanya masalah ekologi, melainkan juga krisis sosial dan kesehatan masyarakat. Pencemaran lingkungan juga berdampak pada citra pariwisata daerah. Ponorogo sebagai kabupaten yang tengah berbenah dalam promosi pariwisata, akan dirugikan jika permasalahan ini tidak segera diatasi. Investor dan wisatawan akan kehilangan kepercayaan terhadap destinasi yang tidak terkelola dengan baik. Dalam konteks ini, peran Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup harus bersinergi dalam merancang program intervensi berbasis kolaborasi dengan desa.

Dengan merujuk pada praktik baik (best practice) dari desa-desa wisata lain yang berhasil mengelola sumber daya alamnya secara berkelanjutan, seperti Desa Ponggok di Klaten atau Nglanggeran di Gunungkidul, maka perlu adanya transformasi pola pikir dari eksploitasi menuju konservasi. Pemerintah Kabupaten Ponorogo juga harus menjadikan peristiwa pencemaran ini sebagai momentum untuk mereformasi kebijakan lingkungan dan memperkuat pembinaan terhadap desa-desa wisata yang sedang tumbuh. Dengan pendekatan berbasis tata kelola partisipatif, pelestarian lingkungan dan pengembangan pariwisata dapat berjalan secara seimbang dan berkelanjutan. Di penelitian ini mencantumkan beberapa hasil penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dari beberapa penelitian terdahulu yang akan dipaparkan pada penelitian kali ini akan ada pembeda dari peneliti-peneliti lainnya. Penelitian terdahulu membantu peneliti menyusun kerangka teoritis yang kuat untuk penelitian mereka. Kerangka teoritis ini menjadi landasan teoritis yang mengarahkan analisis data dan interpretasi hasil penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Rifa'i dan Abdullah pada tahun 2022 berjudul Strategi Komunikasi Dinas Pariwisata dan Kominfo Kabupaten Ponorogo dalam Meningkatkan Wisatawan Air Terjun Pletuk. Penelitian ini berangkat dari permasalahan mengenai rendahnya kunjungan wisatawan ke Air Terjun Pletuk yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain minimnya promosi, kurangnya daya tarik fasilitas penunjang wisata, serta terbatasnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi yang diterapkan oleh instansi pemerintah dalam membangun citra positif dan meningkatkan angka kunjungan wisatawan ke lokasi tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak- pihak terkait, terutama Dinas Pariwisata dan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang digunakan mencakup beberapa tahap penting, yakni: identifikasi target audiens, perumusan pesan yang disesuaikan dengan karakteristik demografis dan psikografis pengunjung, pemilihan saluran komunikasi seperti media sosial, banner, dan promosi online, serta pelaksanaan evaluasi berkala terhadap efektivitas strategi yang dijalankan.

Namun, penelitian ini juga menemukan sejumlah hambatan signifikan, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat lokal terhadap potensi wisata di wilayahnya sendiri, belum optimalnya infrastruktur jalan menuju lokasi air terjun, serta terbatasnya anggaran promosi dari pemerintah daerah. Meskipun demikian, strategi komunikasi yang diterapkan telah menunjukkan pengaruh positif terhadap peningkatan branding wisata daerah, terutama melalui media digital.

Penelitian ini menyarankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha lokal dalam menyusun strategi promosi wisata yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan zaman, khususnya di era digital. Penelitian ini sangat relevan dengan penelitian yang akan dilakukan karena membahas objek wisata yang sama, yaitu Air Terjun Pletuk, serta menyoroti pentingnya peran lembaga pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan dan penataan destinasi wisata. Selain itu, pendekatan kualitatif yang digunakan juga memberikan gambaran mengenai dinamika sosial, strategi promosi, serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan wisata berbasis potensi lokal.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, adapun fokus permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya:

- a) Bagaimana konflik sosial yang terjadi akibat pencemaran lingkungan di kawasan wisata Air Terjun Pletuk, Desa Sooko, Kabupaten Ponorogo?
- b) Siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam konflik tersebut serta bagaimana posisi dan kepentingan masing-masing pihak?
- c) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses penyelesaian konflik lingkungan di kawasan wisata Air Terjun Pletuk?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Menganalisis bentuk dan dinamika konflik sosial yang terjadi akibat pencemaran lingkungan di kawasan wisata Air Terjun Pletuk, Desa Sooko, Kabupaten Ponorogo.
- b) Menganalisis aktor-aktor yang terlibat dalam konflik serta menjelaskan posisi dan kepentingan masing-masing pihak dalam konflik tersebut.
- c) Menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penyelesaian konflik pencemaran lingkungan di kawasan wisata Air Terjun Pletuk.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu pemerintahan, khususnya dalam konteks tata Kelola lingkungan dan pengelolaan pariwisata berbasis keberlanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur terkait peran masyarakat dan pemerintah desa dalam menghadapi persoalan pencemaran lingkungan di Kawasan wisata.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Desa Sooko, Dinas Lingkungan Hidup, Serta pengelola wisata dalam menyusun strategi pengelolaan lingkungan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

E. PENEGASAN ISTILAH

a) Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan dan menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan dapat terjadi pada media air, udara, maupun tanah, yang pada akhirnya berdampak terhadap keberlangsungan ekosistem serta kesehatan masyarakat. Definisi tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menurut Erpinda, Faizaturrohmah, dan Wulandari (2024), pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran air, merupakan salah satu permasalahan yang paling banyak diteliti karena memberikan dampak yang luas terhadap kesehatan manusia, keseimbangan ekosistem, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Hasil kajian bibliometrik mereka menunjukkan bahwa limbah domestik, limbah peternakan, dan aktivitas industri menjadi sumber utama pencemaran yang memerlukan pengelolaan secara terpadu (Erpinda et al., 2024).

Selanjutnya, Fauzi dan Kartika (2024) menjelaskan bahwa pencemaran lingkungan tidak hanya menimbulkan kerusakan ekologis, tetapi juga dapat memicu konflik sosial apabila tidak diimbangi dengan tata kelola lingkungan yang baik. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam mencegah serta mengendalikan pencemaran lingkungan secara berkelanjutan (Fauzi & Kartika, 2024). Sementara itu, Rahmawati (2022) menyatakan bahwa pencemaran lingkungan di kawasan pedesaan umumnya disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran

b) Tata Kelola

Menurut Chhotray dan Stoker (2009), tata kelola adalah seperangkat aturan atau metode dalam pengambilan keputusan kolektif, di mana terdapat pelaku atau organisasi yang plural, dan tidak terdapat sistem kontrol formal yang dapat secara hierarkis menentukan hubungan antar pelaku tersebut. Definisi ini menekankan bahwa dalam tata kelola, relasi kekuasaan bersifat horizontal dan berbasis pada interaksi serta negosiasi antaraktor yang saling tergantung satu sama lain.

Sementara itu, Kooiman (2003) menjelaskan bahwa tata kelola adalah cara masyarakat mengatur urusannya melalui berbagai institusi, jaringan, dan proses yang melibatkan interaksi antara pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat sipil. Dengan demikian, tata kelola menuntut adanya mekanisme kerja sama yang tidak semata-mata bergantung pada otoritas negara, melainkan juga pada kapasitas jejaring sosial dan kolaborasi lintas sektor.

Lebih lanjut, Rhodes (1996) memperkenalkan istilah *governance* sebagai bentuk pergeseran dari model “government” yang menekankan kontrol negara secara terpusat, menuju model yang lebih terbuka dan partisipatif, di mana pemerintah menjadi bagian jaringan antaraktor. Dalam model ini, tata kelola ditandai oleh pengurangan dominasi birokrasi dan peningkatan peran aktor non-pemerintah dalam proses pembangunan. Tata kelola yang baik (*good governance*) menuntut adanya distribusi peran, koordinasi yang harmonis, serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Hal ini juga ditegaskan oleh UNDP (1997) yang menyatakan bahwa tata kelola yang baik mencakup prinsip partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, orientasi pada konsensus, keadilan, efektivitas, dan akuntabilitas.

Dalam konteks pembangunan desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis potensi lokal. Tata kelola desa tidak hanya menuntut efektivitas dalam pelaksanaan program, tetapi juga kemampuan untuk membangun sinergi antar aktor desa, seperti kepala desa, BPD, perangkat desa, BUMDes, serta kelompok masyarakat.

Menurut Moriolkosu et al. (2025), tata kelola yang efektif ditandai oleh adanya struktur kelembagaan yang adaptif, sistem perencanaan yang partisipatif, dan kemampuan untuk membangun strategi kolaboratif dalam menjawab persoalan pembangunan. Dalam sektor pariwisata, tata kelola memegang peran penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan destinasi, mulai dari identifikasi potensi, pengembangan fasilitas, hingga pengawasan dampak lingkungan dan sosial. Tata kelola wisata yang lemah dapat menyebabkan fragmentasi kebijakan, tumpang tindih kewenangan, serta kerentanan terhadap konflik kepentingan antar pelaku.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tata kelola adalah suatu proses pengambilan keputusan kolektif yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur oleh berbagai aktor yang plural, dengan tujuan mencapai hasil pembangunan yang berkelanjutan. Tata kelola yang baik harus berlandaskan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan penegakan hukum, serta memerlukan dukungan kelembagaan dan regulasi yang kuat.

c) Wisata

Istilah wisata secara umum merujuk pada aktivitas perjalanan yang dilakukan secara sukarela dan bersifat sementara oleh satu orang atau sekelompok orang ke suatu lokasi tertentu dengan tujuan untuk rekreasi, pengembangan pribadi, pendidikan, atau mengenal keunikan daya tarik tempat tersebut, tanpa niat mencari nafkah di tempat tujuan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 1 (1); Darma Zanna, 2024) . Pemahaman ini diperkuat oleh Prof. Dr. Yoeti Oka (1994) yang menegaskan bahwa wisata merupakan perjalanan yang memanfaatkan sarana transportasi, akomodasi, dan fasilitas pendukung lainnya, dengan berbagai motif seperti rekreasi, edukasi, budaya, agama, maupun bisnis (Oka, 1994 dalam Salsawisata.com, 2025) . Sejalan dengan itu, Suyitno (2001, dikutip

dalam Ato Basahona, 2016) mengemukakan bahwa wisata memiliki karakteristik perjalanan bersifat sementara, melibatkan komponen wisata seperti transportasi, objek wisata, dan fasilitas suara, serta bertujuan untuk memperoleh kesenangan di mana peserta wisata kembali ke asalnya setelah perjalanan selesai .

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, wisata dalam penelitian ini dipahami sebagai suatu bentuk mobilitas temporer dari masyarakat atau pengunjung ke objek wisata Air Terjun Pletuk yang dipicu oleh tujuan mengalami, menikmati, dan mempelajari keindahan lingkungan alam, sekaligus membawa dampak terhadap aspek sosial, ekonomi, dan ekologi di lokasi tersebut. Pemahaman ini sangat relevan untuk menganalisis interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal, serta melihat bagaimana aktivitas pariwisata memberikan tekanan sekaligus peluang pada pengelolaan dan pelestarian lingkungan di kawasan study kasus.

d). Konflik Sosial

Konflik sosial merupakan suatu proses interaksi yang terjadi ketika terdapat perbedaan kepentingan, tujuan, nilai, atau kebutuhan di antara individu maupun kelompok dalam masyarakat sehingga memunculkan pertentangan. Konflik tidak selalu bersifat negatif, tetapi dapat menjadi bagian dari dinamika kehidupan sosial yang mendorong perubahan, penyesuaian, serta pembentukan hubungan sosial yang lebih baik apabila dikelola secara konstruktif. Menurut Lewis A. Coser (1956), konflik merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Coser menjelaskan bahwa konflik memiliki fungsi positif, yaitu memperkuat solidaritas kelompok, memperjelas batas-batas sosial, serta mendorong perubahan dalam struktur sosial.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Rahmawati (2022) yang menyatakan bahwa konflik sosial dalam pengelolaan lingkungan sering muncul akibat lemahnya implementasi kebijakan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurang optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Konflik akan semakin kompleks apabila tidak disertai komunikasi yang efektif dan mekanisme penyelesaian yang melibatkan seluruh pihak terkait.

Selanjutnya, Fauzi dan Kartika (2024) menjelaskan bahwa konflik sosial akibat pencemaran lingkungan umumnya dipicu oleh benturan kepentingan antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha dalam pemanfaatan sumber daya alam. Penyelesaian konflik memerlukan tata kelola yang kolaboratif, transparan, serta mengedepankan dialog.

Pendapat tersebut juga didukung oleh Maulida (2023) yang menyatakan bahwa konflik yang dikelola melalui .dan kolaborasi dapat menghasilkan perubahan sosial yang positif, seperti meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, terbentuknya kerja sama antaraktor, serta lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap permasalahan lingkungan.

F. PENELITIAN TERDAHULU

a) Kontestasi Aktor dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Pasir Putih Kabupaten Pandeglang (Saputra & Mayrudin, 2024)

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal Saputra dan Yusriadi Mayrudin (2024) berjudul *Actor Contestation in Management of the Pasir Putih Beach Tourist Attraction in Pandeglang Regency* bertujuan untuk

menganalisis kontestasi aktor dalam pengelolaan objek wisata Pantai Pasir Putih di Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis penelitian dilakukan dengan melihat hubungan antaraktor serta menggunakan perspektif Teori Konflik Sosial Lewis A. Coser dalam menjelaskan konflik kepentingan yang muncul dalam pengelolaan kawasan wisata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok masyarakat, dan pengelola wisata mengenai kewenangan pengelolaan destinasi wisata. Perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan ketegangan sosial yang berdampak terhadap efektivitas pengelolaan kawasan wisata. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa konflik tidak selalu bersifat destruktif, tetapi mampu mendorong lahirnya komunikasi, koordinasi, serta pembentukan pola kerja sama baru antaraktor sebagai bentuk penyelesaian konflik.

Penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama membahas konflik sosial, melibatkan berbagai aktor dalam pengelolaan kawasan wisata, serta menggunakan Teori Konflik Sosial Lewis A. Coser sebagai landasan analisis. Namun demikian, terdapat perbedaan yang cukup mendasar. Penelitian Saputra dan Mayrudin (2024) berfokus pada konflik kewenangan dalam pengelolaan objek wisata, sedangkan penelitian ini berfokus pada konflik sosial yang muncul akibat pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah peternakan di kawasan Wisata Air Terjun Pletuk. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu melengkapi penelitian sebelumnya dengan memberikan analisis mengenai hubungan antara pencemaran lingkungan, konflik sosial, aktor yang terlibat, serta proses penyelesaian konflik berdasarkan perspektif Lewis A. Coser.

b) Mapping Conflicts Involving Local Communities in Tourism Destinations:
A Systematic Literature Review (Sevtiani & Abdullah, 2025)

Penelitian yang dilakukan oleh Sevtiani dan Abdullah (2025) berjudul *Mapping Conflicts Involving Local Communities in Tourism Destinations: A Systematic Literature Review* bertujuan untuk memetakan berbagai bentuk konflik yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata berdasarkan berbagai penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya. Penelitian menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan mengumpulkan, menyeleksi, serta menganalisis berbagai artikel ilmiah yang berkaitan dengan konflik sosial pada sektor pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik dalam kawasan wisata umumnya dipengaruhi oleh adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat lokal, pemerintah, investor, dan pengelola wisata. Konflik tersebut dapat berupa konflik pemanfaatan lahan, konflik lingkungan, konflik ekonomi, maupun konflik kebijakan pemerintah. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa penyelesaian konflik memerlukan pendekatan kolaboratif melalui komunikasi, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan, serta mediasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercipta pengelolaan destinasi wisata yang berkelanjutan.

Penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama membahas konflik sosial yang terjadi pada kawasan wisata serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyelesaiannya. Akan tetapi, penelitian Sevtiani dan Abdullah (2025) hanya memetakan berbagai bentuk konflik berdasarkan hasil penelitian terdahulu tanpa mengkaji secara langsung suatu kasus tertentu. Sementara itu, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus pada konflik sosial akibat pencemaran lingkungan di kawasan Wisata Air Terjun Pletuk sehingga mampu memberikan gambaran empiris mengenai penyebab konflik, aktor yang terlibat.

c) Konflik dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Lestari & Suharto, 2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Suharto (2023) berjudul Konflik dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk konflik yang muncul dalam pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antar pemangku kepentingan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik muncul akibat adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat lokal, pemerintah daerah, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dan pelaku usaha wisata. Perbedaan kepentingan tersebut berkaitan dengan pembagian manfaat ekonomi, kewenangan pengelolaan kawasan wisata, serta pelestarian lingkungan. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa konflik tidak selalu berdampak negatif, tetapi dapat menjadi sarana untuk membangun komunikasi.

Penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama membahas konflik sosial yang terjadi dalam pengelolaan kawasan. Persamaan lainnya adalah penggunaan pendekatan kualitatif untuk memahami dinamika hubungan antaraktor. Namun demikian, penelitian Lestari dan Suharto (2023) lebih menitikberatkan pada konflik dalam proses pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat, sedangkan penelitian ini berfokus pada konflik sosial yang muncul akibat pencemaran.

d) Konflik Kepentingan dalam Pembangunan Wisata Religi Perspektif Lewis A. Coser (Helmi, 2024)

Penelitian yang dilakukan oleh Helmi (2024) berjudul Konflik Kepentingan dalam Pembangunan Wisata Religi Perspektif Lewis A. Coser bertujuan untuk menganalisis konflik kepentingan yang muncul dalam proses pembangunan kawasan wisata religi serta menjelaskan bagaimana konflik tersebut dipahami melalui perspektif Teori Konflik Sosial Lewis A. Coser. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menjelaskan hubungan antara kepentingan para aktor dengan dinamika konflik yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah, tokoh masyarakat, pengelola kawasan wisata, dan masyarakat sekitar. Perbedaan kepentingan tersebut berkaitan dengan pemanfaatan ruang, kepentingan ekonomi, pelestarian nilai sosial budaya, serta kebijakan pembangunan yang diterapkan pemerintah.

Penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama menggunakan Teori Konflik Sosial Lewis A. Coser sebagai landasan analisis dan membahas konflik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam suatu kawasan wisata. Akan tetapi, penelitian Helmi (2024) lebih berfokus pada konflik kepentingan dalam pembangunan wisata religi, sedangkan penelitian ini membahas konflik sosial akibat pencemaran lingkungan yang berdampak terhadap keberlangsungan kawasan Wisata Air Terjun Pletuk. Penelitian ini juga tidak hanya mengidentifikasi perbedaan kepentingan antaraktor, tetapi turut menganalisis penyebab pencemaran, dinamika konflik yang berkembang.

e) Dinamika Kepentingan Stakeholder dalam Tata Kelola Wisata Berkelanjutan (Prawira & Prawira, 2025)

Penelitian yang dilakukan oleh Prawira dan Prawira (2025) berjudul *Mapping Power and Interests: Stakeholder Dynamics in Sustainable Outdoor Recreation Governance in Pangandaran, Indonesia* bertujuan untuk menganalisis dinamika hubungan antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan wisata berkelanjutan di Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dokumentasi, serta analisis dokumen kebijakan. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi bentuk hubungan antaraktor, kepentingan masing-masing pihak, serta pengaruhnya terhadap tata kelola destinasi wisata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan wisata dipengaruhi oleh hubungan yang kompleks antara pemerintah daerah, masyarakat lokal, pelaku usaha, organisasi masyarakat, dan pengelola wisata. Perbedaan kepentingan antaraktor sering kali menimbulkan konflik dalam proses pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, pelestarian lingkungan, serta pembagian manfaat ekonomi. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa konflik dapat diminimalkan melalui koordinasi yang baik, komunikasi yang terbuka, partisipasi masyarakat, serta penguatan kelembagaan dalam tata kelola destinasi wisata.

Penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama membahas hubungan antaraktor dalam pengelolaan kawasan wisata serta adanya perbedaan kepentingan yang berpotensi menimbulkan konflik. Selain itu, penelitian tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam

menciptakan tata kelola kawasan wisata yang berkelanjutan. Akan tetapi, penelitian Prawira dan Prawira (2025) lebih berfokus pada dinamika hubungan stakeholder dalam tata kelola destinasi wisata secara umum.

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa kajian mengenai konflik sosial dalam pengelolaan kawasan wisata telah berkembang melalui berbagai perspektif, baik yang menitikberatkan pada konflik antaraktor, tata kelola destinasi, hubungan antar stakeholder, maupun mekanisme penyelesaian konflik. Penelitian Saputra dan Mayrudin (2024) menunjukkan bahwa konflik dalam pengelolaan destinasi wisata dipengaruhi oleh adanya kontestasi kewenangan dan perbedaan kepentingan antaraktor yang terlibat dalam pengelolaan objek wisata. Seviani dan Abdullah (2025) memperluas kajian tersebut dengan memetakan berbagai bentuk konflik yang terjadi pada destinasi wisata melalui pendekatan Systematic Literature Review, sehingga memberikan gambaran mengenai karakteristik konflik yang berkembang dalam sektor pariwisata. Sementara itu, Lestari dan Suharto (2023) menjelaskan bahwa konflik dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dipengaruhi oleh ketimpangan kepentingan, pembagian manfaat ekonomi, dan rendahnya koordinasi antarpemangku kepentingan. Penelitian Helmi (2024) kemudian memperlihatkan bahwa konflik kepentingan dalam pembangunan kawasan wisata dapat dipahami melalui perspektif Teori Konflik Sosial Lewis A. Coser, sedangkan Prawira dan Prawira (2025) menekankan pentingnya hubungan kolaboratif antar stakeholder dalam mewujudkan tata kelola destinasi wisata yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, hasil telaah juga menunjukkan bahwa penelitian-penelitian tersebut masih berorientasi pada konflik dalam konteks pengelolaan destinasi wisata, pembangunan kawasan wisata, hubungan antar stakeholder, maupun strategi penyelesaian konflik secara umum. Dengan kata lain, konflik

diposisikan sebagai konsekuensi dari proses pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata, bukan sebagai akibat dari permasalahan pencemaran lingkungan. Selain itu, penelitian-penelitian tersebut belum menjelaskan secara komprehensif bagaimana pencemaran lingkungan dapat memicu perbedaan kepentingan antaraktor, menimbulkan ketegangan sosial, membentuk solidaritas kelompok, mendorong perubahan sosial, serta memunculkan konflik realistis maupun nonrealistis sebagaimana dijelaskan dalam Teori Konflik Sosial Lewis A. Coser. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya ruang penelitian (research gap) yang belum banyak dikaji, yaitu kajian mengenai konflik sosial yang dipicu oleh pencemaran lingkungan pada kawasan wisata alam dengan menggunakan Teori Konflik Sosial Lewis A. Coser sebagai kerangka analisis utama.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini mengambil posisi yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan memfokuskan kajian pada konflik sosial yang timbul akibat pencemaran lingkungan yang bersumber dari limbah peternakan di kawasan Wisata Air Terjun Pletuk, Desa Sooko, Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi penyebab terjadinya pencemaran lingkungan, tetapi juga menganalisis bagaimana pencemaran tersebut memengaruhi hubungan antara masyarakat, pemilik peternakan, pengelola wisata, pemerintah desa, pemerintah daerah, serta instansi terkait melalui analisis terhadap perbedaan kepentingan, ketegangan sosial, solidaritas kelompok, perubahan sosial, konflik realistis dan nonrealistis, serta mekanisme penyelesaian konflik berdasarkan Teori Konflik Sosial Lewis A. Coser. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar melengkapi penelitian-penelitian terdahulu dari sisi objek penelitian, tetapi juga menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dalam menjelaskan keterkaitan antara pencemaran lingkungan, dinamika konflik sosial, dan tata kelola kawasan wisata. Kontribusi tersebut diharapkan dapat memperkaya

kajian Ilmu Pemerintahan, khususnya pada bidang tata kelola lingkungan dan penyelesaian konflik sosial, sekaligus menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan lingkungan yang lebih partisipatif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

G. LANDASAN TEORI

Lewis A. Coser dalam bukunya *The Functions of Social Conflict* (1956) menjelaskan bahwa konflik merupakan bagian yang wajar dan tidak terelakkan dari kehidupan sosial. Konflik muncul ketika terdapat perbedaan kepentingan, nilai, atau tujuan antara individu maupun kelompok. Namun, berbeda dengan pandangan klasik yang menganggap konflik sebagai ancaman bagi keteraturan sosial, Coser justru menyatakan bahwa konflik dapat memiliki fungsi positif, antara lain untuk memperkuat solidaritas kelompok, memperjelas batas norma, dan bahkan mendorong perubahan sosial yang konstruktif. Sebagai bagian dari kerangka teori dalam penelitian ini, digunakan teori konflik sosial dari Lewis A. Coser untuk menjelaskan dinamika sosial yang muncul akibat adanya pencemaran lingkungan di kawasan wisata. Coser memandang bahwa konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial, terutama ketika terdapat perbedaan kepentingan antara kelompok dalam masyarakat. Konflik, dalam pandangan Coser, bukan hanya sebagai bentuk pertentangan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengungkap struktur sosial yang tersembunyi, memperkuat solidaritas kelompok, dan memicu perubahan sosial.

Sebagai bagian dari kerangka teori dalam penelitian ini, digunakan teori konflik sosial yang dikemukakan oleh Lewis A. Coser untuk menjelaskan dinamika konflik yang timbul akibat pencemaran lingkungan di kawasan wisata Air Terjun Pletuk. Dalam pandangan Coser, konflik merupakan gejala sosial yang wajar dalam masyarakat dan bukan semata-

mata bersifat destruktif. Justru, konflik dapat menjadi alat untuk memperjelas struktur sosial, memperkuat identitas kelompok, serta mendorong terjadinya perubahan sosial yang diperlukan. Konflik sosial seringkali lahir karena ketimpangan atau perbedaan kepentingan yang tidak terselesaikan secara adil.

Landasan Teori (Revisi & Penguatan Sumber Akademik) Dalam penelitian ini digunakan teori konflik sosial yang dikemukakan oleh Lewis A. Coser sebagai pendekatan utama untuk memahami dinamika pencemaran lingkungan di kawasan wisata Air Terjun Pletuk. Teori ini menyatakan bahwa konflik merupakan gejala sosial yang wajar dalam masyarakat, dan muncul sebagai akibat dari adanya perbedaan nilai, tujuan, atau kepentingan antar individu maupun kelompok. Menurut Coser (1956) dalam bukunya *The Functions of Social Conflict*, konflik tidak selalu berdampak negatif, melainkan dapat menjadi pemicu munculnya solidaritas internal kelompok, memperjelas batas norma sosial, serta mendorong terjadinya perubahan sosial yang bersifat konstruktif. Ia menekankan bahwa konflik realistik (yang berakar pada perbedaan kepentingan nyata) dan konflik non-realistik (berdasarkan prasangka atau emosi) keduanya dapat menjadi bagian dari dinamika masyarakat modern, dan perlu dipahami dalam konteks struktur sosial yang melatarbelakangi. Dalam konteks penelitian ini, konflik terjadi karena ketimpangan kepentingan antara masyarakat peternak, yang membuang limbah ke sungai untuk mempertahankan aktivitas ekonominya, dengan masyarakat lokal, wisatawan, dan pengelola wisata, yang berkepentingan menjaga kebersihan dan ekosistem kawasan Air Terjun.

Teori Coser digunakan untuk membedah struktur konflik yang terjadi secara lebih mendalam, dengan melihat indikator utama konflik seperti perbedaan kepentingan, ketegangan sosial, solidaritas kelompok, dan proses penyelesaian. Kerangka ini menjadi penting karena tidak hanya

mengungkap konflik sebagai pertentangan, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk struktur sosial baru dan menuntut adanya kebijakan yang lebih responsif dan partisipatif.

Penguatan Teori dari Literatur dan Jurnal Ilmiah:

1. Erpinda, M., Faizaturrohman, N., & Wulandari, S. (2024). Dalam studi bibliometrik mereka terkait pencemaran air sungai, dijelaskan bahwa konflik sosial akibat pencemaran cenderung meningkat ketika tidak ada integrasi antara kebijakan lingkungan dan kondisi sosial lokal. Ini mendukung relevansi teori konflik sosial sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis dinamika tersebut.
2. Rahmawati, D. (2022) dalam jurnal *Jurnal Kebijakan Desa* menekankan pentingnya tata Kelola konflik dalam pengelolaan limbah peternakan di tingkat desa. Ia menemukan bahwa minimnya partisipasi masyarakat dan lemahnya sosialisasi aturan desa seringkali menjadi pemicu konflik lingkungan.
3. Fauzi, A., & Kartika, W. (2024) dalam jurnal *Lingkungan dan Masyarakat* meneliti sinergi masyarakat dan pemerintah dalam penanganan pencemaran. Hasilnya menunjukkan bahwa konflik sosial dapat ditekan jika dibarengi dengan pembentukan ruang dialog antar aktor lokal.
4. Anisa & Kartika (2021) dalam jurnal *Pengelolaan Lingkungan* menyebut bahwa konflik pencemaran di kawasan wisata air dapat diperparah oleh tumpang tindih kebijakan.
5. Maulida, S. (2023) dalam *Jurnal Ekowisata* menyatakan bahwa perubahan perilaku kolektif masyarakat dan penguatan kapasitas kelembagaan lokal adalah hasil konflik yang dikelola secara dialogis.

Dalam konteks penelitian ini, konflik muncul akibat ketidaksesuaian antara aktivitas ekonomi masyarakat (khususnya peternakan yang menghasilkan limbah), sektor pariwisata yang bergantung pada kebersihan dan kelestarian alam, serta lemahnya pengawasan dari pemerintah desa. Untuk menganalisis konflik tersebut secara sistematis, digunakan sejumlah indikator yang merujuk pada konsep dasar dari teori konflik Lewis A. Coser sebagai berikut:

1. Perbedaan Kepentingan

Merujuk pada adanya pertentangan antara dua atau lebih kelompok yang memiliki tujuan dan kepentingan berbeda dalam mengelola kawasan wisata Air Terjun Pletuk. Di satu sisi, terdapat masyarakat yang mengandalkan sektor peternakan sebagai mata pencaharian utama dan melakukan pembuangan limbah ke aliran sungai.

2. Ketegangan Sosial

Indikator ini menunjukkan adanya gejala sosial berupa kecemasan, kekecewaan, atau ketidakpuasan dari satu pihak terhadap pihak lainnya akibat dampak dari pencemaran lingkungan. Ketegangan ini bisa muncul secara verbal melalui keluhan warga atau wisatawan, maupun secara simbolik dalam bentuk penurunan jumlah kunjungan wisata, rusaknya citra destinasi wisata, dan menurunnya kepercayaan terhadap pengelola.

3. Solidaritas Kelompok

Konflik yang terjadi justru bisa menjadi pemicu terbentuknya solidaritas baru di dalam masyarakat. Dalam konteks Air Terjun Pletuk, konflik akibat pencemaran lingkungan dapat mendorong sekelompok warga untuk bersatu membentuk komunitas peduli lingkungan atau melakukan aksi

kolektif seperti kerja bakti membersihkan sungai dan kawasan wisata. Solidaritas ini timbul dari kesamaan pengalaman atau kepentingan untuk mempertahankan kualitas lingkungan dan mendesak adanya perubahan tata kelola. Munculnya kelompok masyarakat yang aktif dalam penyuluhan, pelaporan pencemaran, atau pelibatan dalam forum desa menunjukkan bahwa konflik dapat memperkuat kohesi sosial pada tingkat lokal.

4. Perubahan Sosial

Konflik yang berlarut-larut tanpa penyelesaian seringkali menjadi tekanan yang memaksa lahirnya perubahan sosial atau kebijakan. Dalam kasus ini, pencemaran yang terjadi akibat limbah peternakan mendorong masyarakat untuk menuntut adanya kebijakan atau aturan baru dari pemerintah desa, seperti larangan membuang limbah ke sungai, penyediaan instalasi pengolahan limbah, atau perbaikan sistem pengawasan lingkungan. Perubahan ini berupa kebijakan formal maupun pergeseran perilaku sosial sebagai bentuk adaptasi tekanan konflik.

5. Konflik Realistis dan Non-Realistis

Konflik realistis terjadi karena perbedaan kepentingan yang nyata, seperti perebutan sumber daya (sungai sebagai sumber air dan tempat pembuangan limbah). Sementara konflik non-realistis muncul karena prasangka atau emosi, misalnya ketidaksukaan antar kelompok warga atau tuduhan sepihak yang tidak berdasar.

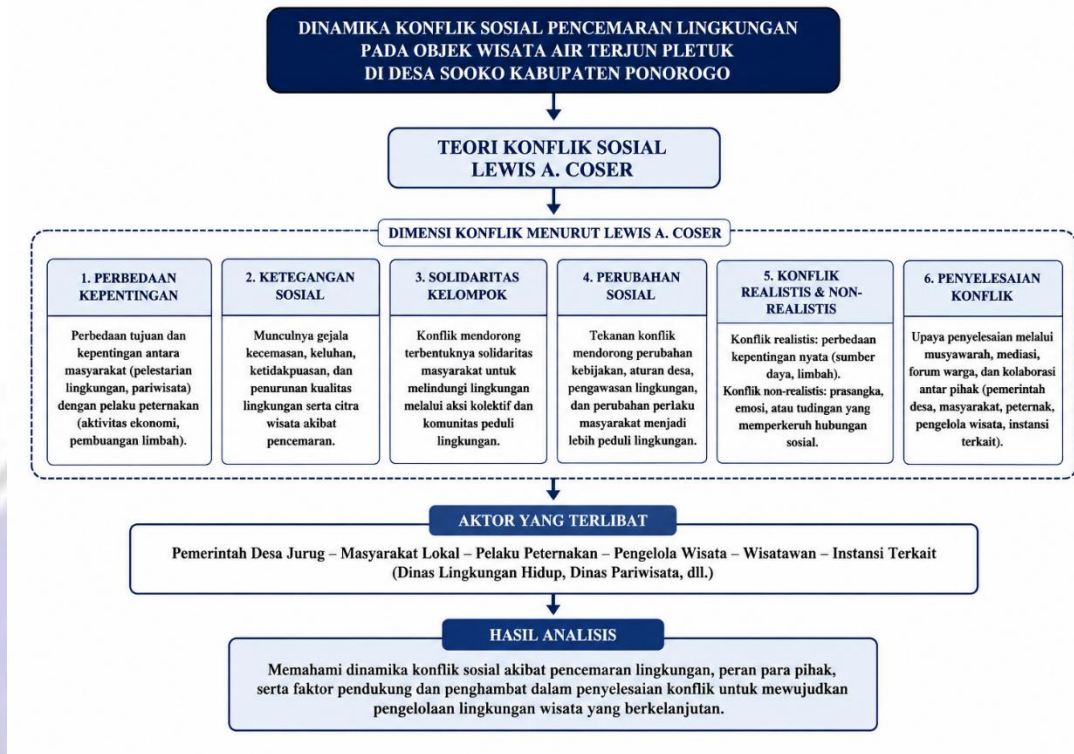
6. Penyelesaian Konflik

Indikator ini mencakup adanya upaya penyelesaian konflik melalui mekanisme musyawarah, forum warga, atau campur tangan dari instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup. Penyelesaian partisipatif dan berbasis kesepakatan menjadi kunci untuk mengatasi konflik serta tata

kelola lingkungan yang berkelanjutan di kawasan wisata Air Terjun Pletuk.

Dalam konteks penelitian berjudul “Dinamika Pencemaran Lingkungan yang Terjadi pada Objek Wisata Air Terjun Pletuk di Desa Sooko Kabupaten Ponorogo”, teori konflik Lewis A. Coser digunakan untuk memahami berbagai pertentangan yang muncul antara kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan berbeda terhadap kawasan wisata. Pencemaran lingkungan yang terjadi di Air Terjun Pletuk disebabkan oleh aktivitas peternakan warga yang membuang limbah ke aliran sungai. Hal ini menimbulkan konflik dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan, seperti pengelola wisata, wisatawan, dan masyarakat lain yang menggantungkan penghasilan dari pariwisata. Konflik juga terjadi akibat lemahnya pengawasan dari pemerintah desa serta kurangnya keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan. Ketegangan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam tata kelola kawasan wisata, di mana belum tercipta sinergi antara kebutuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan fungsi sosial pemerintah.

Gambar 1. 1Bagan Teori Lewis A. Coser



Sumber: Lewis A. Coser (1956)

H. DEFINISI OPERASIONAL

1. Perbedaan Kepentingan

Perbedaan kepentingan dalam penelitian ini diartikan sebagai adanya pertentangan kepentingan antara masyarakat peternak, pengelola wisata, pemerintah desa, dan masyarakat sekitar dalam memanfaatkan kawasan Wisata Air Terjun Pletuk. Perbedaan tersebut muncul karena masyarakat peternak berupaya mempertahankan aktivitas ekonomi melalui usaha peternakan, sedangkan pengelola wisata, wisatawan, dan masyarakat yang bergantung pada sektor pariwisata menghendaki lingkungan yang bersih.

2. Ketegangan Sosial

Dalam penelitian ini diartikan sebagai kondisi yang menunjukkan adanya rasa kecewa, keresahan, ketidakpuasan, maupun hubungan yang kurang harmonis antar pihak akibat pencemaran lingkungan di kawasan Wisata Air Terjun Pletuk. Ketegangan tersebut tercermin dari munculnya keluhan masyarakat dan wisatawan, menurunnya kepercayaan terhadap pengelola maupun pemerintah desa, serta berkurangnya citra positif kawasan wisata. Indikator ini digunakan untuk mengetahui tingkat ketegangan sosial yang muncul sebagai dampak dari konflik yang terjadi.

3. Solidaritas kelompok

Pada penelitian ini diartikan sebagai bentuk kebersamaan, kerja sama, dan kepedulian masyarakat yang muncul sebagai respons terhadap konflik akibat pencemaran lingkungan. Solidaritas tersebut ditunjukkan melalui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan gotong royong membersihkan kawasan wisata, pembentukan kelompok peduli lingkungan, penyampaian laporan mengenai pencemaran, serta partisipasi dalam musyawarah atau forum desa. Indikator ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana konflik.

4. Perubahan sosial

Diartikan sebagai perubahan yang terjadi sebagai dampak dari konflik, baik berupa perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan, meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya pelestarian lingkungan, maupun lahirnya kebijakan dan aturan mengenai pengelolaan limbah peternakan serta pengawasan terhadap kawasan Wisata Air Terjun Pletuk.

5. Konflik realistik dan non-realistik

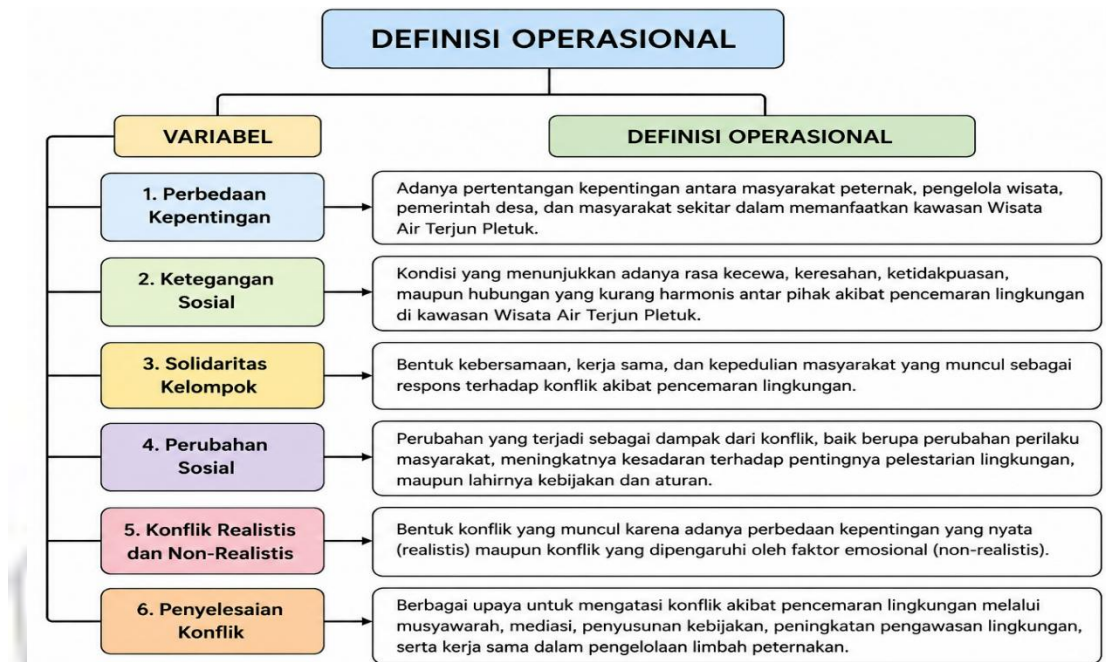
Bentuk konflik yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan yang nyata maupun konflik yang dipengaruhi oleh faktor emosional. Konflik

realistis ditunjukkan melalui pertentangan mengenai pemanfaatan sungai sebagai tempat pembuangan limbah peternakan yang berdampak terhadap kawasan wisata, sedangkan konflik non-realistis ditandai dengan munculnya prasangka, tuduhan, atau ketidaksukaan antar kelompok yang tidak didasarkan pada fakta yang jelas. Indikator ini digunakan untuk mengetahui karakteristik konflik yang berkembang dalam masyarakat.

6. Penyelesaian konflik

Dalam berbagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah desa, pengelola wisata, dan instansi terkait untuk mengatasi konflik akibat pencemaran lingkungan melalui musyawarah, mediasi, penyusunan kebijakan, peningkatan pengawasan lingkungan, serta kerja sama dalam pengelolaan limbah peternakan. Indikator ini digunakan untuk mengetahui efektivitas proses penyelesaian konflik dalam menciptakan hubungan yang lebih harmonis serta mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di kawasan Wisata Air Terjun Pletuk.

Gambar 1. 2 Bagan Definisi Operasional



Sumber : Di olah oleh peneliti, 2026

I. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pencemaran lingkungan yang terjadi di kawasan wisata Air Terjun Pletuk, Desa Sooko, Kabupaten Ponorogo. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial dan lingkungan secara utuh berdasarkan perspektif para pelaku yang terlibat. Seperti yang dijelaskan oleh Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2017:4), pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk mengungkapkan kondisi aktual mengenai dinamika pencemaran, dampaknya terhadap sektor pariwisata dan masyarakat sekitar, serta respon dari pihak-pihak terkait seperti pemerintah desa, masyarakat, dan pelaku wisata. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi secara mendalam mengenai faktor-faktor penyebab pencemaran, interaksi sosial yang terbentuk, serta kebijakan atau tindakan yang telah diambil dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menginterpretasi makna dari tindakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah dalam konteks pengelolaan lingkungan wisata. Oleh karena itu, pendekatan ini dirasa paling relevan untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Sooko merupakan wilayah administratif tempat keberadaan objek wisata Air Terjun Pletuk, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Air Terjun Pletuk sebelumnya dikenal sebagai destinasi wisata alam yang menawarkan panorama yang asri dan air yang jernih. Namun dalam beberapa tahun terakhir, kawasan ini mengalami penurunan kualitas lingkungan akibat pencemaran air yang disebabkan oleh limbah peternakan sapi milik warga. Limbah tersebut mengalir ke aliran sungai yang menuju ke air terjun dan menimbulkan perubahan warna air, bau tidak sedap, serta kerusakan ekosistem.

Desa Sooko dipilih secara purposive (bertujuan), karena merupakan tempat yang paling relevan untuk mengamati langsung dinamika pencemaran lingkungan, dampaknya terhadap sektor pariwisata, serta respon dari masyarakat, pemerintah desa, dan pengelola wisata. Selain itu, lokasi ini juga memberikan akses kepada peneliti untuk menjangkau informan yang terkait secara langsung dengan permasalahan lingkungan yang diteliti.

3). Subjek/Informan Peneliti

Informan dalam penelitian ini merupakan individu yang memiliki keterlibatan langsung ataupun pengetahuan yang cukup mengenai permasalahan pencemaran lingkungan yang terjadi di kawasan Air Terjun Pletuk, Desa Sooko, Kabupaten Ponorogo. Informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.

Menurut Arikunto (2010:183), purposive sampling adalah teknik pengambilan data yang dilakukan secara sengaja, dengan memilih subjek yang dianggap paling mengetahui dan memahami permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, informan terdiri atas masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan wisata dan terdampak langsung oleh pencemaran, pelaku peternakan yang aktivitas usahanya berdekatan dengan aliran sungai menuju air terjun, pengelola wisata baik dari unsur Pokdarwis maupun individu yang terlibat secara informal, aparatur pemerintah desa yang bertanggung jawab terhadap kebijakan lingkungan dan pariwisata, serta perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo sebagai institusi yang berwenang dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan.

Dalam pelaksanaannya, teknik ini juga dapat dikombinasikan dengan pendekatan snowball sampling, yakni peneliti memperoleh informasi mengenai informan tambahan dari informan awal, dengan harapan dapat memperluas dan memperdalam data yang diperoleh. Dengan memilih informan dari berbagai latar belakang yang memiliki hubungan langsung dengan objek penelitian, diharapkan peneliti dapat memperoleh data yang lebih holistik dan mendalam, sehingga mampu menjelaskan dinamika pencemaran lingkungan secara lebih akurat.

4). Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara untuk memperoleh informasi yang mendalam dan komprehensif terkait pencemaran lingkungan di kawasan wisata Air Terjun Pletuk. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam terhadap informan yang telah dipilih berdasarkan teknik purposive sampling. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan pokok namun tetap memberi keleluasaan bagi informan untuk menjelaskan secara rinci sesuai pengalaman dan pengetahuannya. Wawancara ditujukan kepada masyarakat yang terdampak langsung oleh pencemaran, pelaku peternakan, pengelola wisata, aparat pemerintah desa, serta perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo. Melalui teknik ini, peneliti dapat menggali data terkait penyebab, dampak, serta respon dari pencemaran lingkungan yang terjadi.

b) Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, yaitu di kawasan Air Terjun Pletuk dan sekitarnya. Observasi ini bertujuan untuk mengamati secara nyata kondisi pencemaran lingkungan, seperti kualitas air, kebersihan kawasan, aktivitas peternakan warga, dan perilaku wisatawan maupun masyarakat sekitar. Observasi juga digunakan untuk mencatat situasi fisik lingkungan, fasilitas wisata, serta kondisi sosial yang tidak dapat dijangkau melalui wawancara saja.

c) Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dari teknik wawancara dan observasi. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan, seperti hasil uji laboratorium kualitas air, data kunjungan wisatawan, peraturan desa terkait pengelolaan limbah, serta arsip-arsip dari pemerintah desa dan Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu, dokumentasi visual seperti foto kondisi lingkungan dan video dari masyarakat atau media.

5).Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2022:246). Model ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga komponen tersebut berlangsung secara bersamaan dan saling berinteraksi selama proses penelitian.

a). Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan ke dalam bentuk yang lebih terorganisir. Dalam konteks penelitian ini, data yang tidak relevan dengan fokus pada pencemaran lingkungan dan tata kelola kawasan Air Terjun Pletuk akan disisihkan, sedangkan data penting akan dikategorikan dan dirangkum. Menurut Sugiyono (2022:247), “reduksi data dilakukan sejak pengumpulan data dimulai, dan terus berlanjut selama penelitian berlangsung hingga laporan akhir disusun.”

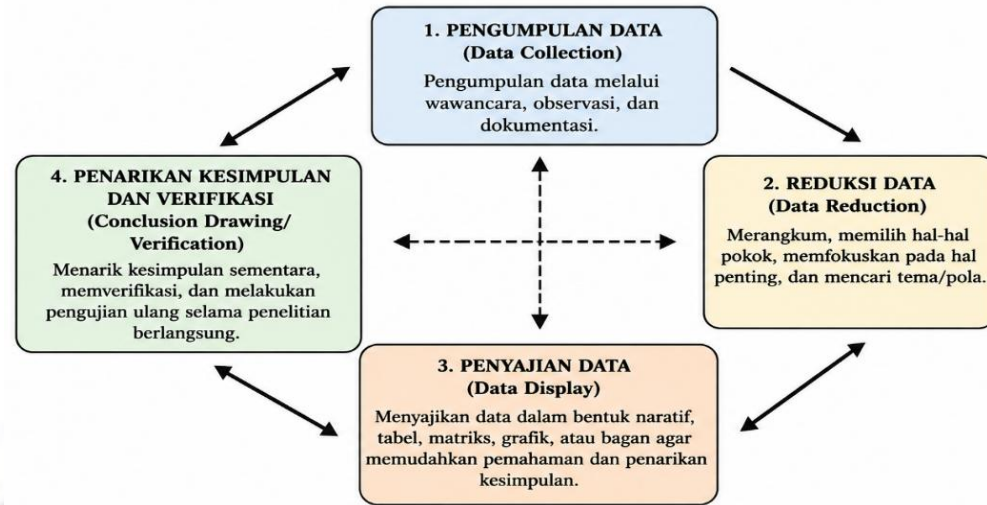
b). Penyajian Data

Penyajian data adalah proses mengorganisasikan dan merangkum data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, penyajian dilakukan dalam bentuk naratif deskriptif, tabel, kutipan wawancara, dan pengelompokan tematik. Tujuan penyajian ini adalah agar peneliti dapat memahami keterkaitan antar informasi, serta melihat pola dan kecenderungan yang muncul dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

c). Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat berubah bila ditemukan bukti baru yang lebih kuat. Oleh karena itu, proses verifikasi dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Kesimpulan diambil berdasarkan pola, pernyataan, atau kecenderungan yang muncul secara konsisten dari data. Seperti dikatakan Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2022:250), “kesimpulan adalah akhir dari proses yang menunjukkan temuan dan makna data yang dikumpulkan.

Tabel 1. 1 Bagan Analisis Data



Sumber : Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014)

6). Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kenyataan di lapangan dan bebas dari bias peneliti. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan empat kriteria trustworthiness yang meliputi credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Kredibilitas data dijaga dengan melakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan seperti masyarakat sekitar, pelaku peternakan, pengelola wisata, serta aparatur pemerintah desa. Selain itu, peneliti juga melakukan member checking dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan agar tidak terjadi kesalahan interpretasi. Langkah ini sesuai dengan pandangan Nowell et al. (2017) bahwa kredibilitas dapat diperoleh.

Untuk menjaga keteralihan atau transferability, peneliti memberikan deskripsi secara rinci mengenai kondisi geografis, sosial, dan aktivitas masyarakat di kawasan Air Terjun Pletuk. Dengan penyajian konteks yang

lengkap dan jelas, pembaca atau peneliti lain dapat menilai apakah hasil penelitian ini relevan untuk diterapkan pada situasi atau lokasi lain yang memiliki karakteristik serupa. Selanjutnya, dependability dijaga dengan mencatat dan mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, hingga tahap analisis. Dengan adanya dokumentasi yang lengkap, proses penelitian ini dapat ditelusuri kembali oleh peneliti lain secara konsisten dan logis, sebagaimana dijelaskan oleh Korstjens dan Moser (2018) bahwa dependability dapat dicapai melalui audit trail dan dokumentasi yang transparan.

Konfirmabilitas (confirmability) dalam penelitian ini dijaga dengan menyimpan seluruh catatan lapangan, hasil wawancara, dokumentasi visual, serta mencatat refleksi peneliti selama proses penelitian. Peneliti berusaha menjaga sikap objektif dan tidak mencampurkan opini pribadi dalam proses interpretasi data sehingga temuan yang dihasilkan benar-benar didasarkan pada fakta empiris yang diperoleh dari para informan. Menurut Korstjens dan Moser (2018), confirmability menunjukkan bahwa temuan penelitian harus dapat ditelusuri kembali kepada data yang diperoleh dari partisipan, bukan berasal dari asumsi atau subjektivitas peneliti. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan memiliki tingkat objektivitas yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam penelitian ini, uji keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk menjaga kualitas data, penelitian ini mengacu pada empat kriteria trustworthiness yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba, yaitu credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Penerapan keempat kriteria tersebut disesuaikan dengan karakteristik penelitian mengenai konflik sosial akibat pencemaran lingkungan.

1. Credibility (Kredibilitas)

Kredibilitas digunakan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Menurut **Lincoln dan Guba (1985)**, credibility merupakan derajat kepercayaan terhadap hasil penelitian sehingga data yang dihasilkan mencerminkan realitas yang sebenarnya. Oleh karena itu, peneliti melakukan pengecekan silang terhadap informasi yang diperoleh dari berbagai informan yang memiliki peran dan kepentingan berbeda, yaitu masyarakat sekitar kawasan wisata, pemilik peternakan, pengelola wisata, Pemerintah Desa Sooko, serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo. Selain membandingkan informasi antar sumber (triangulasi sumber), peneliti juga memadukan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi (triangulasi teknik), sehingga setiap temuan dapat saling menguatkan. Hasil wawancara yang telah ditranskripsikan selanjutnya dikonfirmasi kembali kepada informan melalui proses *member checking* agar informasi yang digunakan benar-benar sesuai dengan pengalaman dan maksud yang disampaikan oleh informan (**Lincoln & Guba, 1985**).

2. Transferability (Keteralihan)

Transferability berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau dijadikan rujukan pada konteks lain yang memiliki karakteristik serupa. **Lincoln dan Guba (1985)** menjelaskan bahwa keteralihan dapat dicapai apabila peneliti menyajikan *thick description* atau uraian yang rinci mengenai konteks penelitian sehingga pembaca dapat menilai sendiri relevansi hasil penelitian pada situasi yang berbeda. Berdasarkan prinsip tersebut, peneliti menyajikan deskripsi secara lengkap mengenai kondisi geografis Desa Sooko, karakteristik kawasan Wisata Air Terjun Pletuk, kondisi sosial

masyarakat, serta permasalahan pencemaran lingkungan yang menjadi fokus penelitian. Selain itu, karakteristik informan, proses pengumpulan data, dan dinamika konflik sosial juga diuraikan secara sistematis sehingga pembaca memperoleh gambaran yang utuh mengenai konteks penelitian (**Lincoln & Guba, 1985**).

3. Dependability (Kebergantungan)

Dependability menunjukkan bahwa proses penelitian dilakukan secara konsisten sehingga setiap tahapan penelitian dapat ditelusuri kembali. Menurut **Lincoln dan Guba (1985)**, kebergantungan dicapai melalui dokumentasi yang sistematis terhadap seluruh proses penelitian sehingga memungkinkan dilakukan audit terhadap prosedur yang telah dilaksanakan. Dalam penelitian ini, peneliti mendokumentasikan setiap tahapan penelitian mulai dari penyusunan rancangan penelitian, penentuan informan, pelaksanaan pengumpulan data, proses analisis data, hingga penarikan kesimpulan. Seluruh aktivitas penelitian dicatat dalam bentuk catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumentasi, serta dokumen pendukung lainnya yang disusun sebagai **audit trail**, sehingga konsistensi pelaksanaan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (**Lincoln & Guba, 1985**).

4. Confirmability (Konfirmabilitas)

Confirmability bertujuan memastikan bahwa hasil penelitian berasal dari data yang ditemukan di lapangan dan bukan merupakan hasil subjektivitas peneliti. **Lincoln dan Guba (1985)** menyatakan bahwa konfirmabilitas berkaitan dengan objektivitas penelitian, yaitu sejauh mana temuan dapat dibuktikan melalui data empiris yang tersedia. Untuk memenuhi kriteria tersebut, seluruh hasil wawancara, catatan observasi, dan dokumentasi disimpan sebagai bukti pendukung dalam proses analisis data. Penafsiran

terhadap temuan penelitian dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari para informan serta diperkuat dengan hasil observasi dan dokumentasi lapangan. Dengan demikian, setiap kesimpulan yang dihasilkan memiliki dasar empiris yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan fakta yang ditemukan selama penelitian berlangsung (**Lincoln & Guba, 1985**).

